

Demokrasi Perspektif Filsafat Pendidikan Barat dan Islam

Siti Sumadiyah^{1*}, Jumari², Abd Haris², Rosichin Mansur⁴

Abstrak

Penelitian ini mengkaji konsep demokrasi dalam perspektif filsafat pendidikan Barat dan Islam. Fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi prinsip-prinsip demokrasi yang sesuai dengan nilai-nilai pendidikan dari kedua tradisi pemikiran tersebut, nilai-nilai yang terkandung, serta pengaruhnya dalam dunia Pendidikan, serta upaya memperkuat demokrasi melalui jalur Pendidikan. Dari perspektif Barat, penelitian ini menjelaskan kontribusi para pemikir seperti Rousseau, Dewey, dan Mill dalam meletakkan dasar bagi demokrasi pendidikan yang seimbang dan inklusif. Sementara itu, dalam perspektif Islam, mengulas pandangan filosofis dari beberapa tokoh seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Khaldun dan Al-Ghazali, menganalisa nilai-nilai demokrasi dalam Pendidikan, menyoroti kesinambungan dan integrasi nilai-nilai demokrasi dengan nilai-nilai Islam, memberikan pijakan untuk memahami bagaimana demokrasi dapat dicapai dalam konteks Pendidikan. Kajian ini berfokus pada kesinambungan dan integrasi nilai-nilai demokrasi dan Islam, serta memberikan dasar untuk memahami bagaimana keselarasan dapat dicapai dalam lingkungan Pendidikan serta menemukan titik temu antara konsep demokrasi dalam pendidikan Barat dan Islam melalui analisis komparatif yang mendetail.

Kata kunci: demokrasi, filsafat pendidikan

History:

Received : 24 Nov 2023

Revised : 28 Nov 2023

Accepted : 29 Nov 2023

Published : 31 Dec 2023

¹Universitas Islam Kediri Kediri Jawa Timur

²Universitas Hasyim Asy'ari

³Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

⁴Universitas Islam Malang

*Author Correspondent: sumadiyah789@gmail.com

Publishers: LPM IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
Bangka Belitung, Indonesia

Licensed: This work is licensed under
[aCreative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Pendahuluan

Demokrasi digunakan oleh negara-negara di dunia sebagai sistem politik alternatif, karena dalam demokrasi tidak ada kekuasaan yang tidak terbatas dan kekuasaan yang diberikan oleh seseorang akan dapat dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh organisasi yang berwenang untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan. Istilah demokrasi kemudian menyebar ke seluruh dunia, bahkan hampir setiap negara di dunia menggunakan sistem pemerintahan demokrasi karena mempunyai kelebihan dan suasana dalam negeri yang aman dan kondusif.

Tidak hanya digunakan dalam sektor kenegaraan tetapi juga dalam semua bidang kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah ke bidang pendidikan khususnya Pendidikan Islam sebagaimana yang akan dibahas dalam penulisan ini yaitu tentang demokrasi dalam filsafat Pendidikan barat dan Islam. Dalam pendidikan Islam, keberadaan demokrasi merupakan suatu hal penting yang patut dijadikan dokumen penelitian khusus. Memang praktik demokrasi pernah dipraktikkan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik dalam menjalankan sistem pemerintahan atau kekuasaan yang ada pada saat itu maupun dalam mengambil keputusan-keputusan yang berkaitan dengan masyarakat atau umat pada zaman Nabi.

Jadi, meskipun kata demokrasi tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan Hadist, namun sudah termuat dalam prinsip-prinsip dan beberapa nilai yang melekat pada demokrasi. Contohnya adalah prinsip musyawarah yang diterapkan Nabi bersama para sahabatnya dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan umum saat itu, yaitu pelaksanaan sistem demokrasi.

Penghormatan akan martabat orang lain merupakan salah satu implementasi dari sistem demokrasi, maksudnya ialah dalam memperlakukan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain supaya sama dengan yang diharapkan oleh seseorang dalam menerima suatu perlakuan orang lain terhadap dirinya sendiri. Dalam sejarah Islam, prinsip penghormatan individu terhadap martabat individu lainnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dalam praktik pembebasan kaum tertindas atau tawanan perang di Makkah seperti dalam peristiwa memerdekakan budak.

Metode

Dalam Penelitian ini menggunakan kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi, data dan berbagai macam informasi yang terkandung dalam tulisan. Dengan mengungkapkan pemeriksaan semacam ini, konsentrasi dan langkah-langkah yang dilakukan dalam eksplorasi ini menjadi semakin jelas.

Metodologi yang digunakan dalam eksplorasi ini adalah metodologi filosofis. Metodologi filosofis digunakan untuk membentuk gagasan-gagasan pokok yang hakikatnya jelas. Sementara itu, metode pengumpulan informasi menggunakan prosedur dokumentasi. Prosedur dokumentasi merupakan strategi pengumpulan informasi yang dilakukan dengan cara mencari informasi tentang faktor-faktor penelitian dari berbagai jenis dokumentasi, baik berupa catatan, catatan, buku, makalah, majalah, buku harian, dan lain-lain. Teknik pemeriksaan yang digunakan adalah investigasi isi.

Hasil dan Diskusi

Pengertian Pendidikan dan Demokrasi

Istilah demokrasi pertama kali diperkenalkan oleh Herodotus dan kemudian dikembangkan oleh pemikir Yunani kuno. Demokrasi berasal dari kata yang berasal dari Bahasa Yunani, yaitu "*demos*" yang berarti rakyat, dan "*kratos*" yang berarti kekuasaan. Dengan kata lain, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat. Dalam demokrasi, rakyat memiliki hak untuk memilih para pemimpin mereka, mengambil keputusan politik, dan mengawasi pemerintah. Hal ini menciptakan mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan yang penting dalam menjaga hak-hak warga negara. Dalam sejarah, istilah demokrasi telah dikenal sejak abad V SM, yang merupakan respon terhadap pengalaman buruk sistem monarki dan kediktatoran di negara-negara kota Athena (Yunani Kuno). "Term" demokrasi, sekarang hampir diterima oleh seluruh pemerintahan yang ada di dunia ini, bahkan pemerintah otoriter pun menerima istilah "demokrasi" untuk mengkarakterisasikan rezim dan aspirasi mereka.

Demokrasi dalam Konteks Filsafat Pendidikan Barat dan Islam

Demokrasi Pendidikan bukan sekedar prosedur tetapi juga nilai yang mengakui kehormatan dan martabat. Melalui upaya demokratisasi pendidikan diharapkan dapat mendorong munculnya individu-individu yang kreatif, kritis, dan produktif. Dalam konteks Pendidikan Indonesia terikat pada UUD 1945, demokrasi pendidikan diartikan sebagai hak setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam memperoleh manfaat pendidikan, yang sejalan dengan deklarasi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 4 ayat (1), yaitu: (1) Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Secara umum, demokrasi dalam pendidikan Barat menggambarkan filosofi dan praktik yang menekankan partisipasi, kebebasan, kesetaraan, dan otonomi individu dalam proses pendidikan. Berikut adalah beberapa poin kunci yang menjelaskan pengertian demokrasi dalam filsafat pendidikan Barat:

1. Partisipasi: Demokrasi dalam pendidikan Barat menekankan pentingnya partisipasi aktif siswa, guru, dan semua pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan terkait

dengan pendidikan. Ini mencakup pembuatan kebijakan, kurikulum, dan pengelolaan sekolah.

2. Kebebasan: Demokrasi pendidikan berfokus pada memberikan kebebasan kepada individu untuk mengejar pengetahuan, berekspresi, dan berkembang sesuai dengan potensi mereka. Kebebasan berpikir, berbicara, dan mengejar minat pribadi sangat dihargai dalam konteks ini.
3. Kesetaraan: Prinsip kesetaraan mengacu pada memberikan kesempatan pendidikan yang sama kepada semua individu tanpa memandang latar belakang, ras, agama, atau faktor-faktor diskriminatif lainnya. Setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
4. Otonomi: Otonomi dalam demokrasi pendidikan memungkinkan sekolah, guru, dan siswa untuk memiliki kendali lebih besar terhadap proses pembelajaran dan pengambilan keputusan yang memengaruhi pendidikan mereka. Ini menciptakan lingkungan pendidikan yang lebih terdesentralisasi.
5. Dialog dan Diskusi: Prinsip ini mendorong dialog terbuka dan diskusi antara semua pemangku kepentingan pendidikan. Keputusan-keputusan terkait pendidikan seringkali dicapai melalui konsensus dan refleksi bersama.

Beberapa tokoh filosof Barat memiliki pandangan yang beragam terhadap demokrasi dalam konteks pendidikan. Ini mencerminkan keragaman pemikiran filosofis dalam sejarah Barat. Berikut adalah pandangan beberapa tokoh terkenal:

1. John Dewey: John Dewey adalah seorang filosof pendidikan Amerika Serikat yang sangat mendukung demokrasi dalam pendidikan. Menurut Dewey, pendidikan adalah sarana untuk mempersiapkan individu menjadi warga negara yang aktif dan berpartisipasi dalam masyarakat demokratis. Ia mempromosikan pendidikan berbasis pengalaman (*experiential education*) yang melibatkan siswa dalam proses belajar aktif dan menekankan peran partisipasi dalam pembentukan pengalaman pendidikan.
2. Jean-Jacques Rousseau: Rousseau adalah seorang filsuf Prancis yang mengemukakan pandangan kritis terhadap pendidikan konvensional dan menekankan pentingnya pengembangan alami individu. Ia berpendapat bahwa pendidikan harus menghormati kebebasan individu dan membiarkan anak-anak belajar melalui pengalaman alamiah mereka. Meskipun pendapatnya sering dikaitkan dengan pemikiran demokratis dalam pendidikan, ia memiliki pandangan yang rumit tentang masalah ini.
3. Paulo Freire: Paulo Freire, seorang pendidik dan filsuf Brasil, terkenal dengan konsep pendidikan pembebasan (*education for liberation*). Ia berpendapat bahwa pendidikan seharusnya membantu individu untuk lebih memahami realitas sosial mereka dan mengatasi ketidaksetaraan. Pandangan Freire memandang pendidikan sebagai alat untuk mengubah masyarakat dan memberikan suara kepada kelompok-kelompok yang terpinggirkan.
4. Martha Nussbaum: Martha Nussbaum, seorang filsuf etika Amerika, telah membahas pentingnya pendidikan untuk kewarganegaraan global dan peningkatan kapasitas empati dan pemahaman lintas budaya. Ia berpendapat bahwa pendidikan demokratis harus mendorong pengembangan keterampilan kritis, etis, dan empati yang diperlukan dalam masyarakat yang multikultural dan global.

Dalam praktiknya, implementasi demokrasi dalam pendidikan Islam dapat bervariasi berdasarkan interpretasi dan tradisi yang berbeda dalam dunia Islam. Namun, nilai-nilai dasar keadilan, kesetaraan, partisipasi, dan moral tetap menjadi pijakan utama dalam filsafat pendidikan Islam yang mencari mencapai tujuan-tujuan yang sejalan dengan ajaran agama Islam.

Dalam konteks pemikiran tentang demokrasi dalam pendidikan Islam, terdapat beberapa tokoh filosof Islam yang telah memberikan kontribusi berharga. Berikut beberapa di antaranya:

1. **Al-Farabi:** Al-Farabi (872-950 M) adalah seorang filosof Islam dari aliran Falsafah Peripatetik yang memiliki pandangan penting tentang pendidikan dalam masyarakat Islam. Ia menggagas ide tentang pendidikan sebagai alat untuk menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis. Al-Farabi memandang bahwa masyarakat yang demokratis memerlukan warga yang terdidik dan terlatih dalam etika, moralitas, dan ilmu pengetahuan.
2. **Ibnu Sina (Avicenna):** Ibnu Sina (980-1037 M) adalah seorang tokoh intelektual yang memainkan peran penting dalam pemikiran filsafat Islam. Dalam karyanya, "Kitab al-Shifa" (The Book of Healing), Ibnu Sina membahas pentingnya pendidikan dalam pembentukan individu dan masyarakat yang adil. Ia mengadvokasi pendidikan yang mencakup etika, logika, dan sains, serta menekankan perlunya partisipasi dan keterlibatan aktif individu dalam proses pembelajaran.
3. **Al-Ghazali:** Al-Ghazali (1058-1111 M) adalah seorang filosof dan teolog Islam terkenal yang menekankan pentingnya akal, etika, dan moralitas dalam pendidikan. Dalam karyanya, "Ihya Ulum al-Din" (The Revival of the Religious Sciences), ia menekankan bahwa pendidikan seharusnya membentuk karakter individu dan mengarahkan mereka pada pemahaman yang lebih baik tentang ajaran Islam.
4. **Ibnu Khaldun:** Ibnu Khaldun (1332-1406 M) adalah seorang sejarawan dan filosof Sosiologi Islam terkemuka yang memandang pendidikan sebagai faktor penting dalam kemajuan dan kejatuhan peradaban. Dalam karyanya yang terkenal, "Muqaddimah" (Prolegomena), ia menggambarkan pentingnya pendidikan dalam mempertahankan struktur sosial dan politik yang stabil.

Prinsip demokrasi pendidikan Islam dijiwai oleh prinsip demokrasi dalam Islam, atau dengan kata lain demokrasi pendidikan Islam merupakan implementasi prinsip demokrasi Islam terhadap pendidikan Islam. Bentuk pelaksanaan demokrasi pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. *Kebebasan bagi pendidik dan peserta didik*

Kebebasan disini meliputi:

- 1) Kebebasan berkarya
- 2) Kebebasan mengembangkan potensi
- 3) Kebebasan berpendapat

2. *Persamaan terhadap Peserta Didik dalam Pendidikan Islam*

Islam memberikan kesempatan yang sama bagi semua peserta didik untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Abuddin Nata menyatakan bahwa peserta didik yang masuk di lembaga pendidikan tidak ada perbedaan derajat atau martabat, karena penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dalam suatu ruangan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan dari pendidik. Pendidik harus mengajar anak orang yang tidak mampu dengan yang mampu secara bersama atas dasar penyediaan kesempatan belajar yang sama bagi semua peserta didik (Nata, 2000). Dalam proses pendidikan dan pengajaran, pendidik dituntut untuk mempunyai kemampuan dalam memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik tanpa ada unsur pilih kasih atau perbedaan terhadap peserta didik yang heterogen.

3. *Penghormatan akan Martabat Individu dalam Pendidikan Islam*

Penghormatan akan martabat orang lain merupakan salah satu implementasi dari sistem demokrasi, maksudnya ialah dalam memperlakukan sesuatu yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain supaya sama dengan yang diharapkan oleh seseorang dalam menerima suatu perlakuan orang lain terhadap dirinya sendiri. Dalam sejarah Islam, prinsip penghormatan individu terhadap martabat individu lainnya telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad saw dalam praktik pembebasan kaum tertindas atau tawanan perang di Makkah seperti dalam peristiwa memerdekakan budak.

Pengaruh Paham Demokrasi Terhadap Pendidikan

Faham demokrasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pendidikan. Beberapa dampak utama dari demokrasi terhadap pendidikan mencakup Pentingnya Pendidikan untuk Kewarganegaraan Demokratis.

- a) Demokrasi menekankan pentingnya partisipasi aktif warga negara dalam proses politik. Oleh karena itu, pendidikan dalam konteks demokrasi sering kali ditujukan untuk membentuk kewarganegaraan yang aktif dan informan. Pendidikan demokratis bertujuan untuk memberdayakan individu dengan pengetahuan politik, pemahaman hak dan tanggung jawab, serta kemampuan berpikir kritis.
- b) Pentingnya Kesetaraan dan Akses untuk Semua Konsep kesetaraan dan akses untuk semua menjadi nilai sentral dalam demokrasi. Pendidikan dalam konteks demokrasi harus menciptakan peluang pendidikan yang setara bagi semua individu tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau kultural mereka.
- c) Pengembangan Keterampilan Demokratis Pendidikan dalam sistem demokratis bertujuan untuk mengembangkan keterampilan dan nilai-nilai yang diperlukan untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokratis. Ini melibatkan pembelajaran keterampilan seperti berpikir kritis, berbicara efektif, mendengarkan, bekerja sama, dan memahami perspektif orang lain.
- d) Keterlibatan Masyarakat Sistem pendidikan dalam konteks demokrasi tidak hanya terbatas pada lingkungan sekolah. Pendidikan diintegrasikan dengan masyarakat yang lebih luas, melibatkan partisipasi orang tua, pemangku kepentingan lokal, dan komunitas secara umum. Hal ini menciptakan ikatan yang lebih erat antara sekolah dan masyarakat.
- e) Pelibatan dalam Pengambilan Keputusan Pendidikan dalam demokrasi menekankan pada partisipasi siswa dalam proses pengambilan keputusan di sekolah. Ada upaya untuk memberikan siswa kesempatan untuk memiliki suara dalam hal-hal yang memengaruhi pengalaman belajar mereka, sehingga membantu membangun keterlibatan dan tanggung jawab.
- f) Pluralisme dan Pendidikan Inklusif Demokrasi mempromosikan pluralisme dan penghargaan terhadap keberagaman. Oleh karena itu, pendidikan dalam sistem demokratis mencakup pendekatan inklusif yang menghormati dan mengakomodasi keberagaman budaya, etnis, agama, dan latar belakang lainnya. Pentingnya Pendidikan Kritis Pendidikan dalam demokrasi mendorong pembelajaran yang kritis, di mana siswa didorong untuk mengevaluasi informasi, berpikir mandiri, dan mengembangkan kemampuan untuk menyuarakan pandangan mereka sendiri. Demokrasi dan pendidikan saling terkait secara erat, dan sistem pendidikan yang demokratis diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan individu sebagai warga negara yang terlibat dan bertanggung jawab.

Nilai-nilai Demokrasi dalam Pendidikan

Demokrasi yang sebelumnya untuk sistem kekuasaan dengan kedaulatan rakyat. Di mana rakyat sebagai penguasa pemerintahan yang dilaksanakan melalui keterwakilan rakyat dalam lembaga kekuasaan legislatif. Demokrasi juga sebagai suatu faham yang mengakui kesetaraan, kebebasan dan penghargaan terhadap hak asasi manusia. Untuk itu demokrasi secara faham ini memiliki nilai-nilai yang dapat diimplementasikan dalam pendidikan. Adapun nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan banyak sekali. Dalam bukunya pesantren dan nilai-nilai demokrasi (Sabarudin, 2018) menguraikan bahwa nilai-nilai demokrasi mencakup beberapa nilai antara lain nilai kebebasan, nilai menghormati orang/kelompok lain, nilai kesetaraan, nilai kerjasama, nilai persaingan, dan nilai kepercayaan. Sementara itu (Asari, 2005) bahwa nilai-nilai dan praktek demokrasi dalam pendidikan Islam klasik, yaitu pluralitas, kesetaraan, toleransi, keterbukaan, dan kebebasan. Dari beberapa pendapat tersebut di atas tentang nilai-nilai demokrasi dalam pendidikan John Dewey dalam (Setiyadi, 2010) antara lain: *education as a necessity of life* (pendidikan sebagai kebutuhan hidup), *education as a social function*

(pendidikan sebagai fungsi sosial), *education as direction* (pendidikan sebagai arahan), *education as growth* (pendidikan sebagai pertumbuhan), *education as preparation* (pendidikan sebagai persiapan), *education is unfolding* (pendidikan sedang berlangsung), *education as training of faculties* (pendidikan sebagai bagian-bagian latihan), *education is formation* (pendidikan adalah pembentuk), *education as recapitulation and retrospection* (pendidikan sebagai rekapitulasi dan retrospeksi), *education as reconstruction* (pendidikan sebagai rekonstruksi), *education as national and as social* (pendidikan sebagai sosial dan nasional).

Penguatan Demokrasi Melalui Jalur Pendidikan

Penguatan demokrasi melalui jalur pendidikan merupakan aspek penting dalam membangun masyarakat yang partisipatif, kritis, dan berdaya. Pendidikan memiliki peran strategis dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam sistem demokrasi. Salah satu cara utama penguatan demokrasi melalui pendidikan adalah dengan memastikan akses pendidikan yang inklusif dan berkualitas bagi semua lapisan masyarakat. Dengan menyediakan akses yang setara, berbagai kelompok masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan dan menjadi bagian dari proses demokrasi. Secara keseluruhan, penguatan demokrasi melalui jalur pendidikan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif, berpartisipasi, dan berdaya. Melalui pendidikan yang inklusif, pemahaman mendalam tentang nilai-nilai demokrasi, dan pengembangan keterampilan kritis, kita dapat memastikan bahwa warga negara memiliki kemampuan untuk berperan aktif dalam proses demokrasi. Dengan cara ini, pendidikan bukan hanya menjadi alat untuk mencapai keberhasilan pribadi, tetapi juga menjadi fondasi untuk membangun masyarakat yang lebih demokratis, adil, dan berkelanjutan. Demokrasi pendidikan telah diterapkan di negara Indonesia sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 4 ayat (1) yaitu “Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa”. Selain itu, ada juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 (1) yang berbunyi bahwa “setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Nilai-nilai demokrasi dalam Islam adalah *Al-musawah* atau persamaan, *Al-hurriyah*, kemerdekaan atau kebebasan, *Al-ukhuwwah* atau persaudaraan, *AlAdalah* atau keadilan, *Al-syura* atau musyawarah, dan *Al-Mas’uliyah/ responsibility* atau prinsip pertanggungjawaban.

Kesimpulan

Dalam demokrasi pendidikan, diterapkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dalam pelaksanaan praktik dan program pendidikan suatu lembaga yang terdiri dari *stake holder* seperti pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, kepala institusi atau lembaga pendidikan dan masyarakat guna mencapai tujuan yang sama sebagaimana yang terdapat dalam visi dan misi lembaga pendidikan. Melalui upaya penerapan nilai demokrasi pendidikan diharapkan dapat mampu mendorong manusia untuk menjadi individu yang aktif, mandiri, kreatif, inovatif, kritis, produktif dan menghargai orang lain.

Referensi

- Daulay, M. R. (2017). Demokrasi Pendidikan Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Islam. *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(1), 91–110. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v3i1.632>
- Abudin Nata, *Pemikiran para Tokoh Pendidikan Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000)
- Pasaribu, G. R., Al-Anshary, A. S., Harsana, A. P., Pratiwi, A., S, E. M., Inayah, F., Sari, K. P., Siregar, N. S., Darus, N. F., Siregar, N. S. I., Hera, S. R., & Zulaila. (2023). Latar Belakang Lahirnya Sistem Demokrasi di Dunia dan Indonesia. *Jurnal Educandumedia*, 02(01), 123–132. <https://jurnal.insanciptamedan.or.id/index.php/educandumedia/article/view/209>
- Rahman, M. (2018). Demokrasi Dalam Filsafat Pendidikan Barat Dan Islam (Kajian Tentang Nilai-

Nilai Demokrasi Dan Implementasinya Dalam Konteks Pendidikan Indonesia). *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 3(2). <https://doi.org/10.37348/cendekia.v3i2.44>

Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). <https://doi.org/10.24967/e>

Sistem Pendidikan Nasional, Pub. L. No. 20 (2003). <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>

Solihin, L., Pratiwi, I., Hijriani, I., Utama, B., & Gandasari, N. (2021). Membentuk Warga Negara yang Demokratis: Konstruksi Literasi Kewargaan dalam Mata Pelajaran PPKn. In M. Saripuddin (Ed.), *Pusat Penelitian Kebijakan Balitbangbuk Kemdikbudristek* (1st ed.). Pusat Penelitian Kebijakan Balitbangbuk Kemdikbudristek. http://repositori.kemdikbud.go.id/24912/1/Puslitjak_2021_Membentuk_Warga_Negara_yang_Demokratis.pdf

Wahyudi, W. E., & Dkk. (2018). Diskursus Filsafat Pendidikan Barat dan Islam: Dari Pertarungan Gagasan Sampai Perebutan Makna dan Arah Pendidikan. In M. I. Jauhari (Ed.), *Mitra Karya* (1st ed.). Mitra Karya.